

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber Daya Alam (SDA) merupakan elemen esensial yang selalu berkaitan dengan kebutuhan manusia. Sejak sebelum era industri 4.0, SDA telah memberikan kontribusi yang signifikan serta manfaat yang besar bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu sumber daya alam yang sering dimanfaatkan karena pengelolaannya relatif mudah tanpa memerlukan peralatan khusus adalah hutan. Kemudahan dalam mengelola hutan menyebabkan penurunan luas hutan setiap tahunnya seiring dengan peningkatan populasi manusia di bumi (Alqhapari et al., 2022). Akibat eksploitasi hutan yang terus menerus, banyak individu yang tidak bertanggung jawab melakukan eksploitasi berlebihan melalui pembakaran hutan. Tindakan ini merupakan contoh buruk dari pengelolaan sumber daya alam hutan yang dilakukan secara serakah oleh manusia.

Kesadaran akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati sangat diperlukan dan harus diarahkan untuk kepentingan jangka panjang. Pengelolaan sumber daya alam yang efektif akan meningkatkan kesejahteraan manusia, sedangkan pengelolaan yang tidak tepat akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia (Dharmawan, 2010). Begitu juga dengan pengelolaan SDA hutan yang tersebar di negara-negara di dunia. Indonesia termasuk dalam negara dengan kekayaan alam terbesar di dunia. Kekayaan SDA yang melimpah ini dapat

dioptimalkan dan dikembangkan sebagai salah satu modal utama untuk memajukan negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 125 juta hektar hutan yang mencakup 63% dari total luas daratannya. Hutan hujan tropis Indonesia adalah yang terbesar ketiga di dunia, setelah Brazil dan Kongo (Achmad Syalaby Ikhsan, 2024). Luasnya hutan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Hutan-hutan ini tidak hanya berfungsi dalam menyerap dan mengurangi polusi udara yang dihasilkan oleh emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri, tetapi juga menyediakan fungsi ekologis penting, seperti penyerapan karbon dioksida dan pemeliharaan kualitas udara secara keseluruhan. Namun, sangat disayangkan bahwa potensi besar sumber daya alam hutan belum dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Alih-alih berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, praktik-praktik destruktif seperti eksploitasi hutan yang berlebihan dan metode pembakaran ilegal justru telah memunculkan berbagai permasalahan baru. Situasi ini sangat memprihatinkan, mengingat potensi SDA hutan seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia apabila dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal (Alqhapari et al., 2022). Eksploitasi yang berlebihan dapat menimbulkan dampak yang fatal, termasuk bencana kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah berlangsung sejak lama dan berulang setiap tahunnya. Pada tahun 2015, Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan paling parah dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data dari Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas hutan dan lahan yang terbakar sepanjang tahun 2015 mencapai 2,61 juta hektar. Jumlah ini hampir sama dengan total luas kebakaran hutan dan lahan selama periode 2016-2021, yang mencapai 3,2 juta hektar (Khusnulhotimah, 2020). Kebakaran pada tahun tersebut mencapai 120 ribu titik api sejak Juni hingga Oktober 2015. World Bank mencatat bahwa kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak signifikan, yang mengakibatkan 28 juta jiwa terdampak, menyebabkan 19 kematian, dan hampir 500 ribu orang mengalami gangguan pernapasan atau ISPA. Asap yang dihasilkan dari kebakaran tersebut juga dirasakan di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam (CNNIndonesia, 2019).

Provinsi Jambi memiliki area hutan dan lahan yang cukup luas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, luas kawasan hutan yang masih dimiliki saat ini mencapai 2,1 juta hektare (Jambi.BPS, 2021). Luasnya hutan dan lahan yang tersebar di wilayah ini menyebabkan Provinsi Jambi berpotensi besar menghadapi permasalahan kebakaran yang terjadi setiap tahun. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terjadi di 11 Kabupaten/Kota. Dari tahun 2019 hingga 2024, terdapat beberapa periode dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang cukup parah, seperti yang terjadi pada tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berikut ini (SiPongi, n.d.):

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi 2019-2024

Tahun	Luas Area Terbakar (Ha)
2019	56.592,00
2020	1.002,00
2021	540,00
2022	919,00
2023	6.539,69
2024	466,07
Total	66.058,76

Sumber: sipongi.menlhk.go.id, 2024

Berdasarkan tabel data di atas, terlihat bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap tahun dengan tingkat keparahan yang sulit untuk diprediksi di Provinsi Jambi. Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jambi yang kerap mengalami tingkat keparahan tinggi akibat kebakaran hutan dan lahan (Arrafi et al., 2024). Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2019 di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Muaro Jambi, merupakan fenomena terbesar dalam 10 tahun terakhir. Kebakaran ini menimbulkan gangguan pada berbagai sektor, termasuk perdagangan, pendidikan, dan sektor lainnya. Kebakaran yang terjadi pada tahun 2019 dipicu oleh fenomena *El Nino* yang mengakibatkan kekeringan di Kabupaten Muaro Jambi. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga disebabkan oleh faktor manusia, salah satunya adalah pembukaan lahan baru untuk pemukiman, serta penyiapan lahan melalui metode pembakaran yang tidak terkendali dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan per Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2019-2024

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Batang Hari	5.745,00	50,00	113,00	54,00	3.282,93	30,02
Bungo	277,00	4,00	0	43,00	27,08	0
Jambi	0	0	0	0	0	0
Kerinci	0	134,00	0	1,00	51,31	0
Merangin	340,00	278,00	1,00	68,00	149,13	4,13
Muaro Jambi	20.891,00	17,00	22,00	114,00	15,68	173,77
Sarolangun	5.583,00	169,00	264,00	399,00	1.324,78	129,71
Sungai Penuh	0	0	0	0	91,15	0
Tanjung Jabung Barat	3.237,00	134,00	20,00	4,00	446,03	51,26
Tanjung Jabung Timur	14.129,00	114,00	16,00	5,00	60,09	74,12
Tebo	6.390,00	102,00	104,00	231,00	1.091,51	3,06
Total	56.592,00	1.002,00	540,00	919,00	6.539,69	466,07

Sumber: sipongi.menlhk.go.id, 2024

Dari tabel data di atas, terlihat bahwa kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi mencakup area yang paling luas dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jambi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi, sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan bencana, berperan dalam mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi situasi darurat. Selain itu, BPBD juga mengembangkan sistem penanganan darurat bencana serta mendukung proses penyaluran bantuan logistik dan peralatan dalam upaya penanggulangan bencana. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi & Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Muaro Jambi.

Namun, realitas di lapangan sering kali tidak sejalan dengan harapan. Berbagai hambatan teridentifikasi, seperti keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya personel BPBD (Muhammad Ajie Ichsan, 2023)

Sejauh ini, upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Muaro Jambi sebagai bentuk nyata dari kapabilitas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah patroli, penambahan jumlah sumber daya manusia, sosialisasi dan penambahan sarana prasarana (Rensi, 2022). Bentuk keterlibatan yang diklasifikasikan sebagai tantangan dan hambatan mengindikasikan bahwa kapabilitas Pemerintah memiliki pengaruh terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berulang. Kapabilitas merupakan bentuk dari kemampuan yang harus dimiliki oleh pemerintah dalam menghadapi tantangan dan masalah. Urgensi penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kapabilitas yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Muaro Jambi dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Sejauh mana tantangan dan hambatan memengaruhi kapabilitas BPBD Kabupaten Muaro Jambi. Kapabilitas tersebut akan menjadi tolak ukur pemahaman yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Muaro Jambi dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan mempertimbangkan kondisi dan tantangan yang terus berkembang di Kabupaten Muaro Jambi.

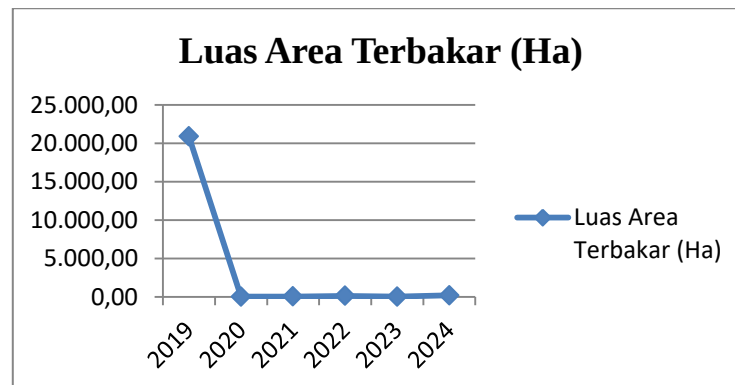
Tabel 1. 3 Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi Per Kabupaten Muaro Jambi 2019-2024

Tahun	Luas Area Terbakar (Ha)
2019	20.891,00
2020	17,00
2021	22,00
2022	114,00
2023	15,68
2024	173,77
Total	21.233,45

Sumber: sipongi.menlhk.go.id, 2024

Data lebih lengkap mengenai luas kebakaran hutan dan lahan per Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 1. 1 Grafik Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi Per Kabupaten Muaro Jambi 2019-2024



Sumber: sipongi.menlhk.go.id, 2024

Berdasarkan data di atas, luas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan fluktuasi dalam kurun waktu 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, luas area yang terbakar mencapai 20.891 hektare, yang merupakan angka

tertinggi dalam periode yang dianalisis. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, luas kebakaran mengalami penurunan signifikan, masing-masing sebesar 17 hektare dan 22 hektare. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan kembali dengan luas kebakaran mencapai 114 hektare, meskipun angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Tren penurunan kembali terlihat pada tahun 2023, di mana luas kebakaran berkurang menjadi 15,68 hektare. Namun, pada tahun 2024, luas kebakaran meningkat drastis menjadi 173,77 hektare. Secara keseluruhan, total luas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi dalam periode 2019-2024 adalah 21.233,45 hektare. Data ini menunjukkan adanya pola fluktuatif dalam kejadian kebakaran, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, serta tingkat kesiapsiagaan pihak terkait dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

Untuk memahami fokus masalah dalam penelitian ini serta memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki keunikan dan merupakan penelitian baru yang penting, penulis dalam hal ini menguraikan sepuluh penelitian terdahulu yang memiliki tema relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yang dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu: Pertama penelitian yang berfokus pada strategi pemerintah dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan hasil temuan dari tiga peneliti (Ananda et al., 2022), (Herfian, 2023), (Chandya, 2021), bahwa pemerintah daerah maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melaksanakan berbagai upaya dan program secara maksimal untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Namun, beberapa kendala masih dihadapi, antara lain efektivitas penanggulangan yang belum optimal dalam mengurangi dampak

kebakaran, kegiatan sosialisasi kurang efektif akibat faktor geografis dan kebiasaan masyarakat yang sulit diawasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan anggaran.

Kategori kedua berfokus pada *collaborative governance* pada penanggulangan kebakaran hutan dan dengan hasil temuan dari tiga peneliti (Safira et al., 2023), (Hashfi Rafdi, 2023), (Nala et al., 2024), menunjukkan bahwa proses kolaborasi telah berjalan dengan cukup baik, ditunjukkan oleh partisipasi aktif sektor swasta dalam upaya pencegahan serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan sanksi yang dapat dikenakan apabila terbukti melakukan tindak kriminal terhadap hutan dan lahan. Implementasi *collaborative governance* dianggap berhasil, dengan komitmen efektif para stakeholder dalam mengurangi jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya. Namun, terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan anggaran, belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Selain itu, teridentifikasi beberapa kelemahan, kekuatan, serta kewenangan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang hasilnya masih memerlukan evaluasi lebih lanjut sebelum melanjutkan proses kolaborasi.

Kategori ketiga berfokus pada implementasi kebijakan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan hasil temuan dari dua peneliti (Ayu Wulandari et al., 2022), (Selvia Junita Praja, Margaretha Rumbekwan, 2020), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan didorong oleh sumber daya manusia yang kompeten, yang meningkatkan responsivitas di lapangan saat kebakaran terjadi serta meminimalkan prosedur dalam

penanganan bencana kebakaran. Selain itu, implementasi kebijakan belum optimal karena banyaknya masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan tersebut dan tidak mengetahui keberadaannya, serta tingkat pemahaman para pelaksana kebijakan terkait juga masih belum memadai sehingga pemerintah perlu menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan pemahaman kepada pelaksana kebijakan.

Kategori keempat atau yang terakhir berfokus pada Kapabilitas Pemerintah dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh (Muetya et al., 2022), (Meiwanda, 2016), dengan temuan bahwa kapabilitas memiliki dampak signifikan terhadap kinerja pemerintah. Salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan kapabilitas dalam menangani kebakaran hutan dan lahan adalah pembagian tugas dan tanggung jawab. Namun, ego sektoral dari berbagai pihak sering kali menjadi hambatan utama yang mengganggu efektivitas koordinasi. Selain itu, upaya pemerintah lebih banyak difokuskan pada pemadaman kebakaran guna mencegah timbulnya kabut asap.

Berdasarkan uraian sebelumnya dan penelitian terdahulu, penulis mengamati bahwa kapabilitas BPBD sangatlah penting dalam bidang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Jumlah anggota personel BPBD merupakan salah satu faktor utama keberhasilan dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah individu-individu yang memiliki keterampilan khusus dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yaitu dapat melakukan tindakan yang efektif untuk menghindari

penyebaran api, karena BPBD menjadi ujung tombak dalam semua bencana. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai kapabilitas BPBD di Kabupaten Muaro Jambi. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam tulisan yang berjudul **“Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2024.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kapabilitas BPBD Kabupaten Muaro Jambi dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Muaro Jambi untuk meningkatkan kapabilitas dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kapabilitas BPBD Kabupaten Muaro Jambi dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Muaro Jambi untuk meningkatkan kapabilitas dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, baik secara praktis maupun secara teoritis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas pengetahuan dan wawasan, serta memberikan sumbangsih guna pengembangan Ilmu Pemerintahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi/rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang.
2. Manfaat praktis, memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam upaya optimalisasi kapabilitas dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kajian dalam bidang pemerintahan serta direkomendasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya lembaga atau instansi pemerintah.

1.5 Landasan Teori

Moleong mendefinisikan landasan teori sebagai sekumpulan proporsi terintegrasi secara sintaksis, mengikuti aturan logis, serta berfungsi sebagai alat untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Sebaliknya, Neuman memiliki perspektif yang sedikit berbeda dengan mendeskripsikan teori sebagai konsep, proporsi, dan definisi yang digunakan untuk menganalisis fenomena secara sistematis (Tamaulina, Irmawati, Muhammad Sabir, 2022). Landasan teori dianggap sebagai suatu konsep yang disusun dengan sistematis, karena berfungsi sebagai fondasi yang

kokoh dalam pelaksanaan penelitian. Selain itu, landasan teori seringkali dipandang sebagai elemen terpenting dalam sebuah penelitian, meliputi berbagai teori dan temuan yang diperoleh melalui kajian literatur.

1.5.1 Organisasi

Organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Stephen P. Robbins dalam Eliana mengemukakan bahwa organisasi merupakan suatu kesatuan (*entity*) sosial yang secara sadar terkoordinasi, dengan kepemimpinan yang dapat diidentifikasi, serta bekerja secara teratur untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan sekelompok orang. Selain itu, Sondang memandang bahwa organisasi merupakan entitas dari sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, serta terikat dalam struktur hierarki yang formal. Dalam organisasi, terdapat hubungan yang jelas antara kelompok yang berperan sebagai pimpinan dan kelompok individu yang dikenal sebagai staf (Sari, 2006).

Torang memandang organisasi sebagai suatu sistem yang mencakup peran, aliran aktivitas, dan proses (pola hubungan kerja) yang melibatkan sejumlah individu sebagai pelaksana tugas yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Wibowo memandang organisasi adalah sebuah wadah yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Dari definisi tersebut, beberapa elemen dasar yang menjadi ciri organisasi dapat diidentifikasi, yaitu: Kumpulan individu, wadah, terstruktur, dan tujuan bersama. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu wadah

yang terdiri dari sekumpulan individu yang terikat oleh hubungan formal dalam sebuah struktur yang terorganisir, dengan tujuan untuk mencapai sasaran bersama secara efektif (Simarmata, 2022).

1.5.2 Kapabilitas

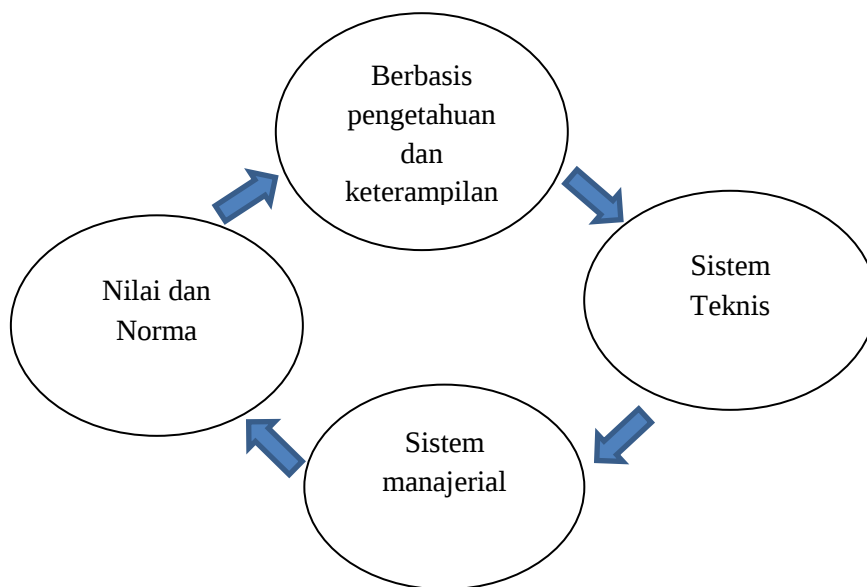
Kapabilitas merupakan bentuk dari kemampuan yang harus dimiliki oleh pemerintah dalam menghadapi tantangan dan masalah (Budiningsih, 2017). Barney dan Clark (2007) dalam Kusumasari mendefinisikan kapabilitas sebagai jenis atribut organisasi, seperti modal keuangan, fisik, dan individu/organisasi, yang dapat dieksploitasi dalam penerapan strategi organisasi. Amir dan Schoemaker (1993) memandang kapabilitas sebagai kapasitas organisasi untuk mengelola sumber daya, menggunakan proses organisasi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Definisi ini mencakup dua aspek utama: pertama, kapabilitas merupakan atribut organisasi yang memungkinkan penggunaan sumber daya yang ada dalam penerapan strategi; kedua, tujuan utama kapabilitas untuk meningkatkan produktivitas sumber daya lain yang dimiliki oleh organisasi.

Kapabilitas didefinisikan oleh Schreyogg & Kliesch-Eberl dalam Kusumasari, tidak hanya merepresentasikan satu jenis sumber daya secara terpisah, seperti aset keuangan, teknologi, atau tenaga kerja, melainkan lebih merupakan metode khas dan unggul dalam mengalokasikan serta mengelola berbagai sumber daya tersebut. Thorpe & Holt dalam kusumasari mendefinisikan Kapabilitas organisasi dipahami sebagai kemampuan alami yang terintegrasi

secara kolektif dan sosial yang disebabkan oleh interaksi sosial dan metode penyelesaian masalah dilakukan secara kolektif.

Menurut Leonard dan Barton dalam Kusumasari, mengidentifikasi empat dimensi yang saling berkaitan sebagai penunjang kapabilitas organisasi. Dimensi pertama adalah pengetahuan dan keterampilan, yang sering dianggap sebagai indikator utama dalam pengembangan organisasi baru. Dimensi kedua berkaitan dengan indikator pengetahuan dan keterampilan yang melekat pada sistem teknis. Dimensi ketiga melibatkan proses penciptaan pengetahuan dan pengendalian yang dipandu melalui sistem manajerial. Dimensi keempat berfokus pada nilai-nilai dan norma-norma yang berkaitan dengan berbagai jenis pengetahuan yang terwujud dan melekat dengan proses penciptaan serta pengendalian pengetahuan.

Gambar 1. 2 Empat Dimensi Kapabilitas



Sumber: Leonard-Barton, 1992

Taufik Amir menjelaskan bahwa dalam menentukan keberhasilan kapabilitas organisasi, sangat penting untuk memperhatikan fungsi keuangan, pemasaran, operasi, dan sumber daya manusia.

a) Fungsi Keuangan

Sumber dana dan mekanisme pengelolaannya memainkan peran penting dalam memastikan terciptanya kondisi keuangan yang sehat selama pelaksanaan kegiatan organisasi.

b) Operasi

Memiliki sistem operasi yang efisien, baik yang bersifat *continue* (di mana produk diproses secara berkelanjutan dan memerlukan perangkat otomatis) maupun yang terkait dengan *leverage* operasional, yang berkaitan dengan pengaruh aktivitas penjualan terhadap pendapatan.

c) Sumber Daya Manusia

Memiliki tim kerja yang solid, hubungan yang industrial, lingkungan kerja yang berkualitas, serta komitmen perusahaan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang unggul.

Penelitian ini menerapkan teori Kapabilitas dari Kusumasari karena teori ini mendefinisikan kapabilitas sebagai sumber daya organisasi, yang mencakup modal keuangan, fisik, individu, dan organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks penelitian yang berfokus pada penanganan bencana khususnya kapabilitas BPBD dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penting untuk mengidentifikasi tuntutan seperti

kondisi yang dinamis dan berkembang, ketidakpastian peran, serta kendala situasional yang menjadi ciri khas lingkungan tanggap bencana. Selain itu, pengembangan kemampuan manajemen yang diperlukan untuk mengatasi bencana juga menjadi fokus utama. Kusumasari memandang kapabilitas sebagai sumber daya dalam manajemen bencana dan mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola setiap tahap manajemen bencana. Oleh karena itu, teori ini dianggap relevan dan sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini.

Menurut Kusumasari, terdapat beberapa indikator dalam teori Kapabilitas pemerintah lokal dalam manajemen bencana, diantaranya:

a) Kelembagaan

Kapabilitas kelembagaan dapat dianalisis melalui adanya struktur organisasi yang disertai dengan kemampuan untuk menjalin jejaring dengan stakeholder. Aspek dalam pengendalian kelembagaan yang efektif diharapkan mampu menghasilkan tingkat kapabilitas kelembagaan yang optimal. Dimensi dalam indikator kapabilitas kelembagaan meliputi pengaturan kelembagaan yang efektif, yang meliputi keberadaan struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas pokok dan fungsi yang terdefinisi dengan baik, serta kemampuan untuk membangun *networking* dengan semua tingkat pemerintahan.

b) Sumber Daya Manusia

Kualitas kapabilitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi dapat dinilai dari sumber daya manusia yang ada, serta pembagian tugas dan delegasi yang jelas. Sumber daya manusia mencakup pegawai yang terlatih,

kompeten, dan selalu siap siaga untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan secara efektif dalam suatu kelembagaan apabila didukung oleh sumber daya manusia, di mana kapabilitas sumber daya manusia tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan dan efektivitas pencapaian tujuan lembaga. Faktor-faktor yang memengaruhi kapabilitas sumber daya manusia meliputi aspek kuantitas, seperti kecukupan jumlah pegawai, serta aspek kualitas, termasuk kesesuaian antara pengisian posisi dengan kompetensi, pembagian tugas yang jelas, dan delegasi yang tepat.

c) Implementasi Kebijakan

Indikator utama dalam implementasi kebijakan adalah tersedianya UU, kebijakan, dan peraturan yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, membangun hubungan dengan institusi lainnya, serta untuk memobilisasi sumber daya. Peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kebencanaan harus ada sebagai dasar hukum. Keberadaan peraturan dan kebijakan terkait penanggulangan bencana disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pemerintah daerah, mengingat karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

d) Keuangan

Salah satu indikator penting dalam kapabilitas adalah kapabilitas keuangan. Hal ini dapat dilihat dari adanya dukungan keuangan yang memadai untuk mendukung seluruh aktivitas dalam manajemen bencana. Keuangan atau pendanaan dalam penanggulangan bencana merupakan sumber daya yang sangat

krusial bagi pemerintah maupun pemerintah daerah, baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana. Sumber daya keuangan ini dimanfaatkan untuk operasional serta mobilisasi sumber daya dalam upaya penanggulangan bencana, serta untuk mendukung kebutuhan teknis maupun non-teknis.

e) Teknis

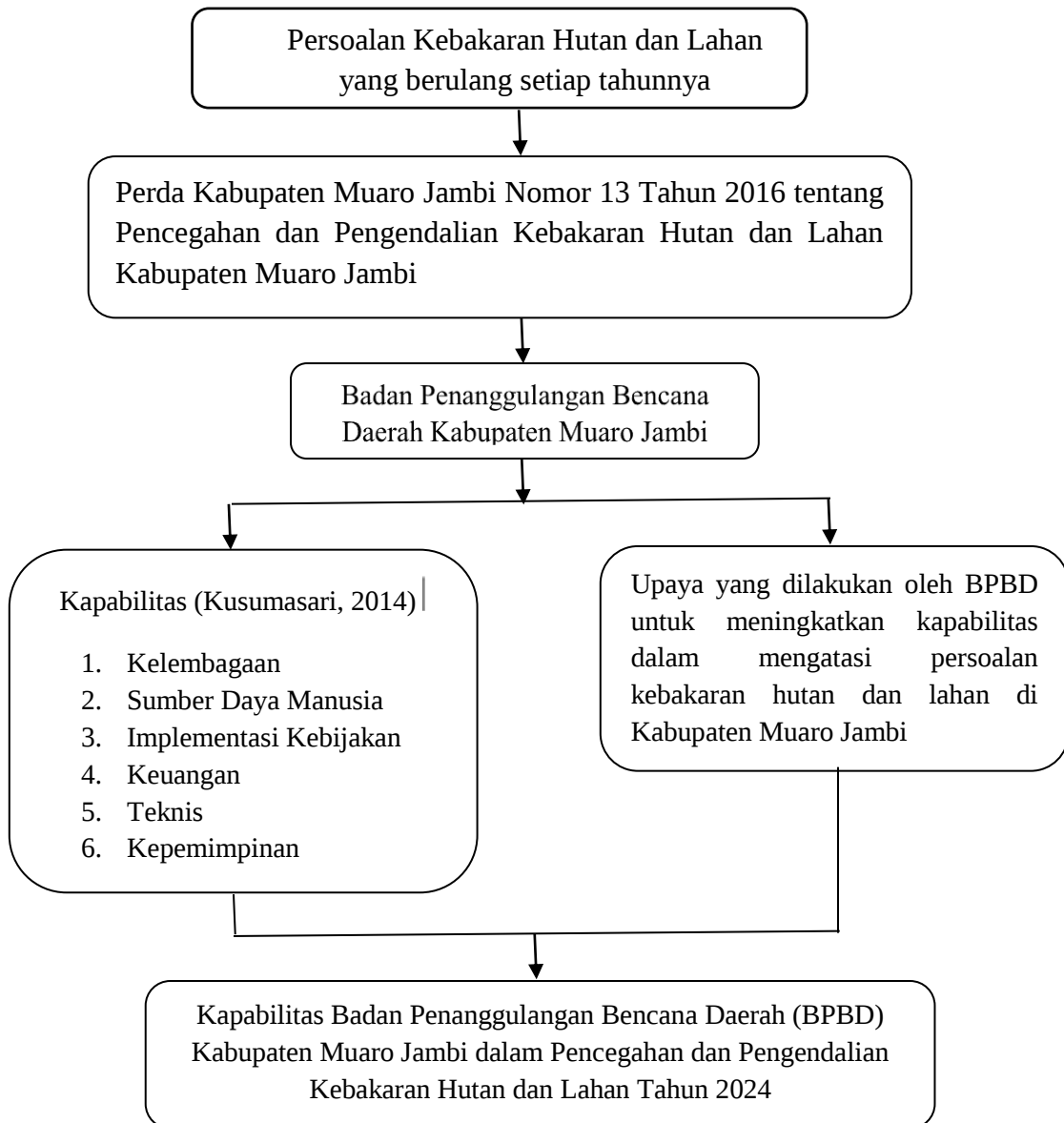
Indikator penting dalam kapabilitas teknis adalah keberadaan sistem manajemen logistik dan sistem teknologi informasi yang efektif, yang memungkinkan komunikasi dan menjalin network dengan berbagai stakeholder. Sistem manajemen logistik yang efisien, teknologi informasi yang efektif, serta kemampuan menjalin networking dengan berbagai stakeholder merupakan aspek teknis yang sangat penting bagi kapabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan manajemen bencana.

f) Kepemimpinan

Memiliki kapasitas kepemimpinan yang dapat membuat keputusan secara cepat dan tepat. Kepemimpinan dalam penanggulangan bencana memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi koordinasi. Kemampuan untuk membuat keputusan secara cepat dan akurat adalah salah satu kebutuhan yang diperlukan oleh seorang pemimpin dalam konteks penanggulangan bencana (Putri et al., 2024).

1.6 Kerangka Berpikir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Organisasi & Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi serta mengikuti kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi, BPBD mempunyai peran serta dalam kebijakan pencegahan dan pengendalian bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi. Untuk mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang setiap tahunnya, penelitian ini akan mengadopsi teori Kapabilitas dari Kusumasari yang mencakup 6 indikator utama, yakni: 1) kelembagaan, 2) sumber daya manusia, 3) implementasi kebijakan, 4) keuangan, 5) teknis, dan 6) kepemimpinan. Dengan menerapkan teori kapabilitas beserta indikator-indikator tersebut, diharapkan kemampuan BPBD Kabupaten Muaro Jambi dalam merespons tantangan dan permasalahan dapat meningkat, sehingga memberikan manfaat jangka panjang. Lebih singkatnya dijelaskan dalam skema di bawah ini:

Gambar 1. 3 Kerangka Berpikir

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih bertujuan untuk memahami permasalahan dalam penelitian secara mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip dalam Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang diamati (Moleong, 2007).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus tentang persoalan kebakaran hutan di kabupaten Muaro Jambi. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan peneliti dapat mengumpulkan informasi secara rinci serta memberikan deskripsi yang komprehensif mengenai kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang di wilayah tersebut.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi. Lokasi ini dipilih karena kebijakan terkait penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian

dilakukan di lokasi ini untuk memperoleh data yang valid dan mendalam terkait permasalahan yang terjadi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan adalah penetapan batasan masalah dalam penelitian kualitatif. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap penelitian yang dilakukan serta mencapai target yang telah ditetapkan, penelitian ini akan terfokus untuk melihat kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi yang menjadi salah satu permasalahan yang ditangani oleh BPBD Kabupaten Muaro Jambi dan menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif meliputi kata-kata dan tindakan. Data tambahan yang dapat mendukung adalah dokumen dan lain-lain (Moleong, 2010). Sumber data merujuk pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Sumber data sangat penting dalam mendukung hasil penelitian, karena memberikan informasi yang akurat dan relevan dengan kondisi di lapangan.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi (Sarwono, 2006).

b. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kajian literatur, laporan-laporan, buku-buku, serta jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder berperan sebagai pelengkap data primer. Penggunaan sumber data sekunder bertujuan untuk memperluas cakupan informasi agar lebih komprehensif. Peneliti menggunakan sumber data seperti beberapa sumber berita online terkait kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi, dan dokumen terkait lainnya yang bersangkutan dengan penelitian.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan. *Purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan khusus. Teknik ini termasuk dalam kategori *nonprobability sampling*, yaitu metode pengambilan sampel di mana setiap unsur atau anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Dengan demikian, hanya orang-orang yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti yang dapat dijadikan informan. Pemilihan teknik *purposive sampling* dimaksudkan agar informasi yang didapat lebih efektif dalam menangkap kelengkapan dan kedalaman data yang menjadi tujuan dalam penelitian ini.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, ada beberapa teknik yang akan digunakan, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara menurut Bogdan dan Biklen ialah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang (tetapi kadang-kadang lebih), yang diarahkan oleh seorang untuk memperoleh informasi. Jenis wawancara yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yang termasuk dalam kategori wawancara mendalam (*in-depth interview*). Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi masalah dengan lebih terbuka dan fleksibel (Syahrums, 2012). Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan, dengan kemungkinan adanya perkembangan atau penambahan pertanyaan selama proses wawancara berlangsung. Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. 4 Daftar Informan

No.	Narasumber	Jumlah Narasumber
1.	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Muaro Jambi	1 Orang
2.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Muaro Jambi	1 Orang
3.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muaro Jambi	1 Orang
4.	Manggala Agni	1 Orang
5.	Masyarakat Kabupaten Muaro Jambi	4 Orang

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi merujuk pada prosedur pengumpulan data melalui pencatatan informasi yang telah tersedia (Syamil et al., 2022). Dokumen yang dapat digunakan sebagai sumber informasi mencakup dokumen pribadi (catatan harian, surat menyurat, autobiografi, dan lain-lain), dokumen resmi (memo, catatan kecil, arsip, hasil statistik, dan lain-lain), serta foto juga dapat menjadi sumber informasi dalam metode dokumentasi (Syahrums, 2012).

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah data mentah menjadi informasi baru, sehingga karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah memberikan pemahaman terhadap orang lain yang membacanya dan berguna untuk memberikan solusi terhadap suatu permasalahan (Syamil et al., 2022). Sedangkan menurut Moleong, analisis data ialah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat-tema dapat diidentifikasi hipotesis kerja dapat dirumuskan sesuai dengan data yang ada (Syahrums, 2012).

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Model analisis kualitatif yang diterapkan merujuk pada model interaktif yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman. Model interaktif ini mencakup beberapa tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data

Miles dan Huberman mendefinisikan reduksi data merupakan proses seleksi, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Melakukan reduksi data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk memudahkan peneliti dalam memilah dan menentukan data yang relevan serta perlu diperinci lebih lanjut. Dengan mereduksi data, informasi yang telah dikumpulkan dapat disederhanakan serta disajikan dengan jelas dan terstruktur. Dalam mereduksi data, terdapat beberapa tahapan yaitu identifikasi satuan (unit), membuat coding (memberikan kode pada setiap satuan), kategorisasi, sintesisasi, dan menyusun hipotesis.

b. Penyajian Data

Tahap selanjutnya setelah proses reduksi data yaitu penyajian data. Miles dan Huberman menyatakan penyajian data merujuk pada sekumpulan informasi terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Dalam penelitian kualitatif, metode yang paling umum digunakan untuk menyajikan data adalah dalam bentuk teks naratif. Penyajian data dalam bentuk ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman alur penelitian.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Setelah data direduksi atau diringkas serta disajikan, tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, proses verifikasi dilaksanakan dengan cara meninjau kembali data yang telah diperoleh dari lapangan serta tukar

pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektivitas (Syahrur, 2012).

1.7.8 Keabsahan Data atau Triangulasi Data

Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi merupakan metode yang memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lain di luar data tersebut sebagai alat untuk pengecekan atau pembanding. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan membandingkan hasil wawancara dari masing-masing informan yang telah ditentukan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang diperoleh. Sementara itu, triangulasi metode digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan memeriksa informan yang sama dari informan yang sama, namun menggunakan teknik yang berbeda. Keabsahan data dalam penelitian ini diukur melalui pemeriksaan beragam data yang didapat dari informasi terhadap validitas dan penyajian data. Tingkat keabsahan data yang dicapai akan tergantung pada jenis penelitian, konteks penelitian, dan sumber daya yang tersedia.